

Pandemi COVID-19 menyoroti semakin berlapisnya kerentanan bagi anak



Dampak langsung pandemi terhadap kerentanan anak

- ▶ Anak dengan kondisi kesehatan atau kebutuhan khusus rentan terinfeksi COVID-19 dengan tingkat keparahan yang lebih tinggi. Misalnya, anak dengan disabilitas, anak *stunting*, dan anak berpenyakit komorbid, seperti HIV.
- ▶ Anak rentan secara fisik dan psikologis selama pembatasan sosial, seperti penghentian aktivitas di sekolah atau di lingkungan komunitas.



Situasi pengasuh/keluarga yang berdampak pada kerentanan anak

- Meningkatnya kerentanan pengasuh (terinfeksi COVID-19 atau tambahan beban ekonomi dari pandemi), meningkatkan kemungkinan anak tidak terpenuhi hak dan kebutuhannya.*
- ▶ Anak tidak mendapatkan pengasuhan memadai karena pengasuh/orang tua meninggal atau melakukan isolasi akibat terinfeksi COVID-19.
 - ▶ Stres bagi orang tua atau pengasuh dalam mendampingi anak, seperti selama pembelajaran jarak jauh (PJJ), serta beban ekonomi selama pandemi mengakibatkan anak rentan mengalami kekerasan.



Anak yang berada di luar pengasuhan keluarga semakin rentan selama pandemi

- ▶ Kesulitan menerapkan protokol kesehatan karena ruang yang terbatas untuk menjaga jarak bagi anak di dalam lembaga seperti di panti atau lembaga pemasyarakatan (Lapas).
- ▶ Kesulitan menerapkan pola hidup bersih bagi anak terlantar atau yang tinggal di jalanan.
- ▶ Umumnya, anak yang tinggal di lembaga pengasuhan atau yang terlantar tidak punya domisili tetap yang menjadi syarat untuk memperoleh dokumen kependudukan. Tanpa dokumen kependudukan, anak-anak sulit mengakses layanan dasar, termasuk vaksinasi COVID-19.

Pandemi COVID-19 telah menguji sistem perlindungan sosial yang belum mampu memenuhi kebutuhan kelompok rentan, khususnya anak rentan.



- ▶ Hanya sedikit kebijakan perlindungan sosial yang berfokus pada anak. Program perlindungan sosial lebih banyak diarahkan pada bantuan sosial tunai dan non-tunai serta program terkait ketenagakerjaan.
- ▶ Sebagian besar program perlindungan sosial pandemi menasar unit keluarga/rumah tangga, hanya sedikit program yang khusus menasar kelompok anak rentan.
- ▶ Meski Indonesia memiliki berbagai kebijakan perlindungan anak dan bantuan sosial bagi masyarakat miskin, kebijakan dan bantuan tersebut masih belum terhubung dengan efektif.

Di sisi lain, beragam inisiatif organisasi non-pemerintah atau LSM turut merespons pemenuhan kebutuhan kelompok rentan selama pandemi.



Tingkat nasional: inisiatif LSM didominasi oleh pemberian bantuan langsung tunai serta dukungan teknis dalam manajemen pelayanan bantuan sosial kepada anak rentan, terutama anak yatim piatu (YAPI) akibat COVID 19.

Tingkat regional: LSM lebih banyak bergerak pada pemberian bantuan non-tunai.

- ▶ Pendampingan bagi kelompok rentan (termasuk korban kekerasan)
- ▶ Bantuan fasilitas untuk PJJ
- ▶ Pemberdayaan ekonomi
- ▶ Memfasilitasi administrasi kependudukan
- ▶ Vaksinasi COVID-19
- ▶ Dukungan perawatan sosial bagi anak-anak YAPI dan anak-anak di panti

Sejumlah tantangan dalam implementasi sistem perlindungan sosial dan respons terhadap pandemi:



Tantangan terkait data penduduk rentan

- ▶ Basis data tentang kemiskinan dan kelompok rentan belum terintegrasi antarinstansi maupun lembaga yang memberikan bantuan.
- ▶ Data mengenai kerentanan anak selama pandemi juga terbatas. Banyak informasi yang belum diketahui sehingga program dukungan untuk anak-anak rentan tidak responsif.



Tantangan ketersediaan layanan bagi kelompok rentan

- ▶ Respons pemerintah belum mencakup kebutuhan berlapis anak, terutama terkait kesehatan mental dan kekerasan.
- ▶ Pengalihan fokus anggaran baik pusat maupun daerah serta pembatasan sosial untuk pencegahan dan penanganan COVID-19 mengakibatkan layanan bagi kelompok rentan terhenti atau tertunda, seperti layanan perlindungan anak dan perempuan, penjangkauan kelompok rentan, imunisasi, hingga kesehatan mental sebagai layanan.



Tantangan terkait sumber daya manusia

- ▶ Perbedaan kapasitas dan kinerja antara berbagai lembaga dan penyedia layanan dalam merespons situasi darurat, khususnya dalam mendukung kelompok rentan.
- ▶ Psikologis petugas layanan juga terganggu akibat perasaan takut dan khawatir terinfeksi COVID-19 saat memberikan pelayanan.



Tantangan terkait kewenangan dan koordinasi antarinstansi

- ▶ Masih terjadi tumpang tindih kewenangan antar lembaga pemerintah terkait program antara sektor sosial dan perlindungan anak.
- ▶ Keterbatasan wewenang pemerintah daerah dalam pengelolaan data kemiskinan (DTKS) dan kependudukan (SIK) yang terpusat membuat petugas di tingkat daerah sulit melakukan verifikasi, validasi, dan pembaruan data penerima manfaat.

Peluang dalam pelaksanaan sistem perlindungan sosial.



- ▶ Setiap lembaga terdorong untuk lebih meningkatkan efektivitas program-programnya.
- ▶ Perubahan layanan menjadi daring yang bisa meningkatkan daya jangkauan layanan.
- ▶ Meningkatnya aksi kolektif warga dalam menutupi kekosongan layanan dari pemerintah.



Baca selengkapnya pada laporan studi
**"Mata Rantai yang Hilang dalam
Prioritas Reformasi Perlindungan Sosial
di Indonesia."**

Studi ini menggarisbawahi prioritas rekomendasi bagi pemerintah dan advokasi bagi LSM dalam mendorong sistem perlindungan sosial yang lebih inklusif dan komprehensif

Prioritas 1: Perluasan Definisi Kerentanan



Bagi Pemerintah:

- Menggunakan pendekatan multidimensi untuk mengubah orientasi perlindungan sosial pada pemenuhan hak, tidak hanya pengurangan kemiskinan.
- Melibatkan anak-anak dan pengasuhnya untuk mengidentifikasi kebutuhan mereka, serta rutin mengevaluasi implementasi kebijakan perlindungan sosial.
- Membenahi akses/cakupan, kualitas, keandalan, serta inklusivitas dalam layanan kesehatan, pendidikan, pekerjaan dan pemukiman di masa non-krisis.

Bagi LSM:

- Mengubah paradigma perlindungan sosial pada upaya pemenuhan hak, tidak hanya pengurangan kemiskinan.
- Mengadvokasi pemerintah untuk memperluas definisi kerentanan, serta membantu identifikasi kebutuhan serta kelompok-kelompok rentan baru.
- Mengawasi pelaksanaan kebijakan perlindungan sosial dan memastikan evaluasi rutin demi menjamin perbaikan layanan.

Prioritas 2: Mengikutsertakan anak rentan dalam kebijakan adaptif di masa darurat



Bagi Pemerintah:

- Memastikan perlindungan sosial mencakup definisi kerentanan lebih luas, terutama anak-anak di luar pengasuhan tradisional (anak di panti asuhan, lembaga pemasyarakatan, pengungsi, anak telantar).
- Memastikan harmonisasi bantuan dan layanan sosial, dengan menyediakan alokasi sumber daya yang sepadan di daerah.
- Meningkatkan investasi sosial untuk merekrut dan melatih pendamping masyarakat untuk memberikan layanan yang dibutuhkan, terutama bagi anak di luar pengasuhan tradisional.

Bagi LSM:

- Menyusun strategi advokasi untuk mendorong perluasan perlindungan sosial, terutama bagi anak di luar pengasuhan tradisional.
- Mendampingi anak di luar pengasuhan tradisional untuk memperoleh layanan yang tepat, sembari mendorong pemerintah meningkatkan jumlah dan kualitas pekerja sosial.

Prioritas 3: Perkuat Tata Kelola Pendataan dan Layanan



Bagi Pemerintah:

- Memperkuat panduan teknis pengelolaan data yang interoperabel dan terkoordinasi di dalam maupun antarkementerian dan lembaga terkait.
- Memastikan kelompok rentan terhubung ke berbagai layanan khusus di luar bantuan sosial berbasis data yang ada.
- Melaksanakan pendataan sistematis dan berkelanjutan terhadap kelompok rentan di luar keluarga atau rumah tangga.

Bagi LSM:

- Memetakan kelompok anak rentan di luar keluarga/ rumah tangga, termasuk bentuk kerentanan dan layanan yang dibutuhkan.
- Menyertakan anak dari kelompok rentan, terutama anak di luar pengasuhan keluarga dalam proses pemetaan, penyusunan dan advokasi layanan yang dibutuhkan.
- Mengawasi penggunaan basis data agar sesuai dengan tujuan dan koridor dalam penyaluran bantuan sosial.

Prioritas 4: Perkuat koordinasi dan kolaborasi antar lembaga pemerintah dan non pemerintah dalam pemenuhan kebutuhan kelompok rentan



Bagi Pemerintah:

- Pemerintah pusat memberi kesempatan pada pemerintah daerah untuk berbagi peran dalam pengelolaan data dan pendistribusian bantuan agar lebih tepat sasaran.
- Mengakomodasi secara sistematis rujukan masyarakat demi pemutakhiran data agar bantuan semakin tepat sasaran.
- Mendorong kolaborasi dan koordinasi antarlembaga, serta menyusun kebijakan dengan membuka ruang kolaborasi dengan LSM dan pihak swasta secara lebih terstruktur dan terkoordinasi.

Bagi LSM:

- LSM berkolaborasi dengan pihak swasta (yang dapat membantu dalam segi anggaran) serta pemerintah, untuk meningkatkan cakupan dan efisiensi distribusi bantuan.
- Mengawasi distribusi bantuan terhadap kebutuhan individu (anak dan keluarga) secara tepat dan adil.

Prioritas 5: Perkuat LSM di tingkat lokal dan dorong koalisi antar LSM yang memiliki keahlian beragam



Bagi LSM:

- LSM di bidang perlindungan anak dan perlindungan sosial di tingkat nasional dapat berkoalisi dengan LSM di tingkat lokal untuk menjalankan kerja-kerja advokasi terhadap kebijakan pemerintah daerah.
- Sesama LSM juga bisa saling menyumbang keahlian di bidang advokasi dan layanan untuk memperkuat kapasitas dan mendorong pendekatan berbasis hak dalam layanan sosial.
- Mendorong edukasi dan partisipasi sosial politik bagi warga negara, termasuk anak dan kelompok muda, terutama dari kelompok rentan.

Prioritas 6: Manfaatkan peluang transformasi digital secara bertahap dan berhati-hati



Bagi Pemerintah:

- Melakukan penelitian dan kajian secara berkala untuk memahami dinamika dan tantangan dalam pemanfaatan teknologi digital.
- Migrasi layanan sosial ke ranah digital secara bertahap dan berhati-hati, mengingat sebagian layanan sosial lebih optimal jika dilakukan secara luring dan sejumlah kelompok rentan masih membutuhkan layanan analog.
- Mengadakan investasi yang signifikan untuk meningkatkan infrastruktur digital, terutama di daerah terpencil dan kurang terlayani, termasuk pengadaan jaringan internet yang stabil dan fasilitas pengisian daya yang memadai, sembari meningkatkan pemahaman teknologi digital masyarakat.

Bagi LSM:

- Mendorong dilakukannya studi tentang dinamika dan tantangan teknologi digital terkait kelompok rentan yang mereka dampingi.
- Menginformasikan tentang kebutuhan infrastruktur teknologi digital di masyarakat, terutama di daerah terpencil dan kurang terlayani.
- Mengawasi detail perencanaan transformasi pelayanan digital agar tetap ramah-pengguna, menjamin kerahasiaan data, bersifat inklusif, serta memastikan ketersediaan layanan luring/analog.
- Membantu meningkatkan literasi digital melalui edukasi tentang manfaat, risiko dan keamanan digital.



Baca selengkapnya pada laporan studi
**"Mata Rantai yang Hilang dalam
Prioritas Reformasi Perlindungan Sosial
di Indonesia."**